

# ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN APBD TAHUN 2020 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Safira Maulia  
NPP. 29.0063  
Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh  
Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.0063@praja.ipdn.a.id

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The implementation of regional autonomy and fiscal decentralization requires local governments to have greater regional financial independence. Attention to revenue management and analysis of regional income is very important for local governments. PAD in the APBD is one measure of regional financial capacity. A large PAD indicates the high independence of a region in financing the affairs of the autonomous government. On the other hand, a region cannot be said to be self-reliant if its PAD is still small. **Purpose:** This study aims to describe how the financial performance of the Langsa City Government during the Covid-19 Pandemic by using the Regional Financial Independence Ratio Analysis, PAD Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, and Growth Ratio, to then analyze the five ratios to see APBD performance in 2020 during the Covid-19 Pandemic in Langsa City. **Method:** This study uses qualitative descriptive. The data collection techniques were carried out by interview techniques, observation techniques, and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the amount of income obtained by Langsa Regency is very small. **Conclusion:** The results of the research obtained in 2018-2020 show that the Regional Financial Independence Ratio is classified as instructive. Then the Effectiveness Ratio is quite effective with an average of 83.55%. The Efficiency Ratio is classified as very efficient with an average yield of 5.00%. Furthermore, the Routine Expenditure Ratio obtained a result of 64.73% while the Development Expenditure Ratio obtained a result of 18.45%. Then the last is the Growth Ratio with the results of the percentage growth ratio of total income getting numbers with an average of 86.94% while the percentage of PAD growth is 5.55%. The Langsa City regional government has not yet achieved the expected target due to the low local revenue during the COVID-19 pandemic and the increase in routine spending in the Langsa City area due to the large employee costs incurred.

**Keywords:** Regional Financial Ratios, APBD Performance

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pandemi Covid-19 membawa dampak yang relatif besar bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat mempengaruhi keadaan ekonomi yang ada. Terganggunya aktifitas perekonomian maka akan berdampak pula pada perubahan serta postur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, baik pada segi pendapatan maupun belanja daerahnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Pada masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan, untuk kemudian dilakukan analisis pada kelima rasio tersebut untuk melihat kinerja APBD pada Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer serta data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pendapatan asli daerah Kota Langsa tergolong sangat rendah sehingga lebih banyak mengandalkan bantuan transfer dari pusat. **Kesimpulan:** Hasil penelitian yang didapat pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong instruktif. Kemudian pada Rasio Efektivitas tergolong cukup efektif dengan rata-rata 83,55%. Pada Rasio Efisiensi tergolong sangat efisien dengan perolehan hasil rata-rata 5,00%. Selanjutnya pada Rasio Belanja Rutin memperoleh hasil 64,73% sedangkan Rasio Belanja Pembangunan memperoleh hasil 18,45%. Kemudian yang terakhir Rasio Pertumbuhan dengan hasil presentase rasio pertumbuhan total pendapatan memperoleh angka dengan rata-rata 86,94% sedangkan presentase pertumbuhan PAD sebesar 5,55%. Pemerintah daerah kota langsa belum memperoleh target yang diharapkan dikarenakan rendahnya pendapatan asli daerahnya pada masa pandemi covid-19 serta meningkatnya belanja rutin daerah kota langsa disebabkan karena besarnya biaya pegawai yang dikeluarkan.

**Kata kunci:** Rasio Keuangan Daerah, Kinerja APBD

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang relatif besar bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah di seluruh Indonesia. Sejak munculnya Covid-19 banyak yang merasakan dampak dari Covid-19 ini mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga pemerintah dimana banyaknya aturan-aturan yang berubah, kebijakan-kebijakan yang baru, serta ruang gerak yang serba terbatas. Kebijakan dari pemerintah Indonesia meberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan bisa menurunkan akibat dari krisis ekonomi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut sangat

mempengaruhi keadaan ekonomi yang ada di Indonesia. Sejak digulirkannya peraturan dan kebijakan mengenai Covid-19 ini berbagai langkah dan upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa di antaranya yaitu menghimbau masyarakat guna mengurangi kegiatan di luar rumah, melakukan *work from home*, bagi mahasiswa maupun pelajar melaksanakan belajar secara daring, penutupan tempat wisata, tempat ibadah, melakukan pembagian masker, memberikan dana bantuan baik dalam bentuk sembako, serta melakukan bantuan dengan cara mendirikan posko-posko penanggulangan covid 19 bagi masyarakat yang terdampak dan terganggunya perekonomian dan usaha kerjanya guna meringankan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Terganggunya aktifitas perekonomian maka akan berdampak pada perubahan serta postur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, baik pada segi pendapatan maupun belanja daerahnya. Hak serta kewajiban daerah yang kemudian direalisasikan oleh pemerintah daerah pada wujud rencana kerja serta di jabarkan lebih lanjut pada struktur anggaran yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan daerah dan dikelola pada sistem pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Laporan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Laporan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
2018	Pendapatan	681.844.337.665,00	806.608.245.619,65	118,30 %
	PAD	125.634.683.815,00	121.316.713.328,93	96,56 %
	DAU	444.209.420.000,00	444.209.420.000,00	100,00 %
	DAK	0,00	131.946.202.463,00	∞
	Belanja	582.817.105.360,00	689.735.498.604,25	118,35 %
2019	Pendapatan	958.741.649.670,00	909.788.751.296,94	94,89 %
	PAD	153.718.784.258,00	115.244.246.710,49	74,97 %
	DAU	456.700.561.000,00	456.700.561.000,00	100,00 %
	DAK	154.067.922.000,00	146.296.436.065,00	94,96 %
	Belanja	887.136.927.086,88	822.133.878.343,95	92,67 %
2020	Pendapatan	904.745.925.850,00	861.563.457.580,00	95,23%
	PAD	159.592.856.511,00	126.277.867.970,00	79,13%
	DAU	416.834.350.000,00	414.459.534.000,00	99,43%
	DAK	96.181.881.000,00	92.428.569.973,00	99,19%
	Belanja	813.851.403.066,87	754.374.876.443,00	92,69%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2018-2020 (Data Diolah).

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kota Langsa tahun 2018-2020 secara umum cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, meskipun juga terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020. Pendapatan daerah Kota Langsa didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sangat kecil terhadap seluruh total pendapatan. Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah memiliki porsi pengeluaran yang cukup tinggi. Realisasi belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Provinsi Aceh”. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2020 terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2018-2020. Perkembangan keuangan daerah Kota Langsa terjadi fluktuasi. Bagi penerimaan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada Tahun 2018 anggaran pendapatan pada APBD sebesar Rp.681.844.337.665,00 namun presentase nya mengalami kenaikan sebesar 118,30% dan pada tahun 2019 terjadinya peningkatan dimana pemerintah daerah dapat merealisasikan anggarannya sebesar 94,89%, kemudian pada tahun 2020 jumlah anggaran yang didapat pemerintah ternyata dapat terealisasikan dengan baik yaitu sebesar 95,23%. Anggaran belanja pada APBD yang diterima Tahun 2018 sebesar Rp. 582.817.105.360,00 dan terealisasi sebanyak 118,35% pada Tahun 2019 anggaran belanja yang diberikan oleh pemerintah ternyata dapat meralisasikan anggaran belanja yang diberikan sebesar 92,67% dan pada Tahun 2020 terjadinya peningkatan yaitu teralisasi sebesar 92,69 %. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan daerah sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja APBD 2020 pada masa pandemi Covid-19 Sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Ayu pada tahun 2018 rasio keuangan membuktikan jika rasio kemandirian keuangan daerah dala kategori masih rendah, rasio efektivitas pada kategori sangat efektif serta rasio efisiensi pada kategori sangat efisien. Peneliti Riswati

yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 menemukan bahwa Pada Pemerintah Kota Langsa pendapatan belum mencapai target yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah hanya sebesar 11,00%. Selanjutnya meningkatnya belanja daerah Kota Langsa diakibatkan dari besarnya biaya yang dibutuhkan guna belanja pegawai, yakni senilai 90,37% serta belanja modal sejumlah 46,63%. Penelitian Anjely dkk yang berjudul Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2021, menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan. Penelitian Norma pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menemukan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah baik dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian Intan tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 dalam Perspektif Islam, penulis menemukan bahwa rasio kemandirian rata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Intan Marlia, 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni menganalisis rasio keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan APBD tahun 2020 terutama pada masa pandemi covid-19 di Kota Langsa Provinsi Aceh namun menggunakan metode sama yaitu analisis rasio seperti yang digunakan peneliti Ayu, Riswati, Anjely dkk, Norma dan Intan yakni menggunakan teori dari Halim dan Mahmudi (Halim, 2016 dan Mahmudi, 2016) yang menyatakan bahwa ada sejumlah jenis rasio keuangan yang bisa dikembangkan berlandaskan data kekuatan yang berasal dari APBD yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu daerah.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Pada masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan, untuk kemudian dilakukan analisis pada kelima rasio tersebut untuk melihat kinerja APBD pada Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana arahan maupun gambaran dengan nyata tentang fakta-fakta serta keadaan yang

sesungguhnya tentang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa 2020 di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi dilapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya guna dapat di tarik suatu kesimpulan. Dengan fokus penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja APBD Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Terutama Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Provinsi Aceh dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemampuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Langsa untuk tahun anggaran 2018-2020. Rasio yang digunakan oleh penulis adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Langsa yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Dari data tersebut akan diketahui Kinerja Keuangan berdasarkan Pengelolaan APBD Tahun 2020 Terutama Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Adapun hasil analisis tersebut adalah:

#### 3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	121.316.713.328,93	806.608.245.619,65	14,32	Rendah Sekali
2019	115.244.246.710,49	909.788.751.296,94	21,83	Rendah Sekali
2020	126.277.867.970,70	861.563.457.580,70	19,20	Rendah Sekali

Sumber: BPKD Kota Langsa (Data Diolah) 2021

Keterangan :

Rendah Sekali : 0%- 25%  
 Rendah : 25%- 50%  
 Sedang : 50% - 75%  
 Tinggi : 75% -100%

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa presntase rasio kemandirian yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuaktif, yang berarti bahwa pada tahun 2018 angka yang diperoleh sebesar 18,16%. Kemudian tahun 2019 terjadinya penurunan sebesar 3,35%. Kemudian pada tahun 2020 diperoleh lagi sebesar 17,61% dengan rata-rata hasil yang diperoleh selama 3 tahun berturut-turut sebesar 16,86%. Rasio kemandirian diperoleh hasil perhitungan yang berada diantara 0% - 25%, maka rasio kemandirian suatu pemerintah kota langsa tersebut dapat dikatakan instruktif, yang berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian dari pemerintah daerah tersebut.

### 3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kota Langsa Periode Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 3.

**Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	121.316.713.328,93	125.634.683.815,00	96,56	Efektif
2019	115.244.246.710,49	153.718.784.258,00	74,97	Cukup Efektif
2020	126.277.867.970,70	159.592.856.511,00	79,13	Cukup Efektif

Sumber: BPKD Kota Langsa (Data Diolah) 2021

Keterangan :

Sangat Efektif	:	>100%
Efektif	:	100%
Cukup Efektif	:	90% - 99%
Kurang Efektif	:	75% 99%
Tidak Efektif	:	<75%

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Rasio Efektivitas PAD di Kota Langsa dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadinya fluktuatif dimana penurunan yang terlihat sangat signifikan dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 96,56% namun pada tahun 2019 terjadinya penurunan sebesar 21,59% kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali sebesar 4,16% dengan total rata-rata Rasio Efektivitas PAD yaitu sebesar 83,55 yang tergolong cukup efektif. Ini berarti Pemerintah Kota Langsa sudah

cukup efektif dalam mengelola PAD nya. Namun, diharapkan ini dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan menjadi lebih efektif lagi.

### 3.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode Tahun 2011-2014 ditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	6.065.835.666,45	875.285.276.022,00	5,00	Sangat Efisien
2019	5.762.212.335,53	869.302.985.537,00	5,00	Sangat Efisien
2020	6.313.893.398,54	865.496.303.506,00	5,00	Sangat Efisien

Sumber: BPKD Kota Langsa (Data Diolah) 2021

Keterangan :

Sangat Tidak Efisien	:	>40%
Kurang Efisien	:	31%- 40%
Cukup Efisien	:	21% - 30%
Efisiensi	:	10% -20%
Sangat Efisien	:	<10%

Dari hasil diatas dapat di lihat bahwa hasil dari Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa dari tahun 2018-2020 tidak mengalami perbuahan atau disebut juga bersifat statis. Dimana dari tahun ke tahun rasio efisiensi pemerintah Kota Langsa sebesar 5,00%. Dengan rata-rata dari rasio efisiensi yaitu 5,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota langsa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PAD.

### 3.4 Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja terdiri dari rasio belanja rutin terhadap APBD dan juga rasio belanja pembangunan terhadap APBD. Rasio belanja rutin terhadap APBD merupakan hasil dari perhitungan total belanja rutin terhadap total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD merupakan hasil dari perhitungan dari total belanja pembangunan

terhadap total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termuat pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

**Tabel 5. Presentase Rasio Keserasian Belanja APBD Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD (%)	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)
2018	66	121.316.713.328,93
2019	62,6	115.244.246.710,49
2020	65,6	126.277.867.970,70

Sumber: BPKD Kota Langsa (Data Diolah) 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa presentase rasio belanja rutin serta belanja pembangunan yang diperoleh pemerintah Kota Langsa berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka yang diperoleh dari rasio belanja rutin sebesar 66%, sementara rasio belanja pembangunannya sebesar 14,32%. Kemudian pada tahun 2019 angka yang diperoleh rasio belanja rutin mengalami peningkatan sebesar 2,6% dengan rasio belanja pembangunannya meningkat dari 14,32% menjadi 21,83%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka rasio belanja rutin kembali mengalami peningkatan sebesar 3,00% dengan rasio pembangunannya mengalami penurunan sebesar 2,63%. Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota langsa selama 3 tahun (2018-2020) perolehan rata-rata rasio belanja rutin terhadap APBD kota langsa sebesar 64,73% sedangkan rata-rata belanja pembangunan terhadap APBD kota langsa sebesar 18,45%

### 3.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan terdiri dari presentase pertumbuhan PAD dan presentase pertumbuhan total pendapatan. Rasio pertumbuhan merupakan hasil perhitungan yang diperoleh dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah kota langsa dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya untuk dapat dipertahankan maupun ditingkatkan pada periode berikutnya.

**Tabel 5. Presentase Rasio Pertumbuhan APBD Kota Langsa Tahun 2018-2020**

Tahun Anggaran	Presentase Pertumbuhan Total Pendapatan (%)	Presentase Pertumbuhan PAD (%)
2018	79,44	0,98
2019	12,80	-5,00
2020	-5,30	9,57

Sumber: BPKD Kota Langsa (Data Diolah) 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa presentase pertumbuhan total pendapatan dan presentase pertumbuhan PAD yang diperoleh mengalami fluktuatif. Dimana angka yang diperoleh tahun 2018 sebesar 79,44%, sementara presentase pertumbuhan PAD nya pada angka 0,98%. Kemudian pada tahun 2019 presentase pertumbuhan total pendapatan mengalami penurunan sebesar 66,64% dengan presentase pertumbuhan PAD sebesar -5,00%. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar -5,30 dengan presentase pertumbuhan PAD sebesar 9,57%.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan factor penghambat dalam penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam meningkatkan Kinerja APBD Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa. Permasalahan yang ada adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Fakkaf ini tergolong sangat rendah sehingga lebih banyak mengandalkan bantuan transfer dari pusat. Hal ini mengakibatkan daerah sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Dimana perkembangan keuangan daerah Kota Langsa tahun 2018-2020 terjadi fluktuasi. Bagi penerimaan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada Tahun 2018 anggaran pendapatan pada APBD sebesar Rp.681.844.337.665,00 namun presentase nya mengalami kenaikan sebesar 118,30% dan pada tahun 2019 terjadinya peningkatan dimana pemerintah daerah dapat merealisasikan anggarannya sebesar 94,89%, kemudian pada tahun 2020 jumlah anggaran yang didapat pemerintah ternyata dapat terealisasi dengan baik yaitu sebesar 95,23%. Anggaran belanja pada APBD yang diterima Tahun 2018 sebesar Rp. 582.817.105.360,00 dan terealisasi sebanyak 118,35% pada Tahun 2019 anggaran belanja yang diberikan oleh pemerintah ternyata dapat meralisasikan anggaran belanja yang diberikan sebesar 92,67% dan pada Tahun 2020 terjadinya peningkatan yaitu teralisasi sebesar 92,69 %.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2020, maka dapat di tarik kesimpulan Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Langsa pada tahun anggaran 2018-2020 masih tergolong instruktif. Sementara pada Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa pada tahun 2018-2020 tergolong cukup efektif yaitu dengan rata-rata berada pada angka 83,55%. Sementara pada Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa pada tahun 2018-2020 tergolong cukup efektif yaitu dengan rata-rata berada pada angka 83,55%. Kemudian pada Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa rata-rata belanja rutin lebih besar dengan angka 64,73% sedangkan belanja pembangunannya tergolong cukup rendah yaitu sebesar 18,45%.

**Ketebatasan Penelitian.** Penelitian ini hanya tebatas pada periode watu tiga tahun anggaran dan tebatas hanya di Kota Langsa di Provinsi Aceh. Penelitian hanya terbatas pada indikator Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal saja. Kemudian penelitian ini hanya tebatas pada 5 rasio

untuk mengukur kinerja keuangan daerah, mengingat masih banyak rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun anggaran, dan dapat menambahkan kabupaten/kota untuk dijadikan sampel dan dapat menambah rasio keuangan sehingga penelitian akan lebih valid.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Damuri dan Hirawan (2020). Mengukur Dampak COVID pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU- 015. 26 Maret 2020.

Edy, Sutrisno, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

Halim, A., & Kusufi, M. S., 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.-----, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4.

Halim Abdul, 2015. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.-----, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How a Virus is Turning The World Upside Down. *Bmj*, 1336(April), m1336. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1336>

Sayuti, R. H., & Hidayati, S. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 133-150.

Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta  
Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada  
Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah YR  
Damuri, FB Hirawan (2020) CSIS Indonesia Mengukur dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia 2020. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8941233750415961682&hl=en&oi=scholar>